

ABSTRAK

Perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Nomor 169/Pdt.G/2017/PN/Tng serta Putusan PT Nomor 9/Pdt/2018/PT. Btn. yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor : 975 K/Pdt/2019. Permasalahan lainnya adalah mengenai kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor : 975 K/Pdt/2019 dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan jenis pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan dasar untuk diteliti menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung mengenai perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kemudian putusan Mahkamah Agung juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Hukum Penerbangan, Perlindungan Hukum, Konsumen.

ABSTRACT

Protection provided by law is an action or effort to protect the public from arbitrary acts. The problem in this study is regarding the judge's considerations in the PN Decision Number 169/Pdt.G/2017/PN/Tng and the PT's Decision Number 9/Pdt/2018/PT. Btn. which was canceled by the decision of the Supreme Court Number: 975 K/Pdt/2019. Another problem is regarding the suitability of the Supreme Court's Decision Number: 975 K/Pdt/2019 with the Consumer Protection Act and the Aviation Law. The research method used is normative research with a case approach and a statutory approach. Normative research is carried out by examining legal materials in the form of laws and regulations which are the basic material to be studied using qualitative analysis. The results of this study indicate that there are differences in the judgment of judges at the District Court, High Court, and Supreme Court regarding acts of default and acts against the law. Then the Supreme Court's decision has also been in accordance with Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Aviation Law, Legal Protection, Consumer.